

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sumberdaya alam dan lingkungan memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Sumberdaya alam, selain menyediakan barang dan jasa, juga menjadi tulang punggung (*backbone*) dari pertumbuhan ekonomi dan sumber penghasilan masyarakat serta sebagai asset bangsa yang penting. Oleh karena itu, ketersediaan dan kesinambungan (*sustainability*) dari sumberdaya alam ini menjadi sangat *crucial* bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan akan sangat tergantung dari pengelolaan yang baik oleh setiap *stake holder* yakni masyarakat dan pemerintah.

Pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya alam dewasa ini diarahkan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat (ekonomi), adil (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainable natural resources*). Hal ini dimungkinkan karena SDA merupakan modal penting dalam menggerakkan pembangunan di suatu daerah, baik dalam konteks negara, provinsi, kabupaten maupun kota. Oleh karenanya dalam pemanfaatan SDA, aspek perencanaan yang strategis merupakan langkah dalam menentukan jumlah penerimaan dan tingkat kontribusinya dalam pembentukan modal pembangunan.

Hutan mangrove merupakan sumberdaya alam khas pesisir tropika, yang mempunyai manfaat ganda dengan pengaruh yang sangat luas apabila ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Besarnya peranan hutan mangrove atau ekosistem mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari banyaknya jenis flora fauna yang hidup dalam ekosistem perairan dan daratan yang membentuk ekosistem mangrove. Kawasan

yang kaya akan keanekaragaman hayati ini mempunyai segudang harapan bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Secara langsung dan tidak langsung manfaat ekosistem mangrove telah banyak diketahui dan dirasakan oleh masyarakat, seperti sebagai tempat mencari ikan, udang, kepiting, bahan bakar dan sumber obat-obatan.

Sumberdaya mangrove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan asalkan tingkat pemanfaatannya tidak melampaui kapasitas produksinya. Potensi sumberdaya alam wilayah pesisir dan lautan di Indonesia yang sangat besar tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik, sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkesinambungan, sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar konsep pembangunan nasional. Kenyataannya dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut, faktor keberlanjutan sumberdaya alam (SDA) sering diabaikan dengan terjadinya degradasi SDA yang memprihatinkan di berbagai daerah, juga karena kebijakan pengelolaan sekarang sering memperkuat kecenderungan untuk mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan, sehingga kebijakan baru perlu dikembangkan untuk memperbaiki kegagalan pasar.

Kabupaten Bintan adalah salah satu wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari sekitar 174 buah pulau-pulau besar dan kecil. Daerah ini kaya akan sumberdaya lautnya yang ditandai dengan hampir 98 % wilayahnya berupa wilayah pesisir. Pulau Bintan merupakan pulau terbesar dalam wilayah Kabupaten Bintan, dengan panjang pantai sekitar 728 Km yang terdiri dari beragam jenis penggunaan lahan pantai mulai dari pemukiman, hutan mangrove, pantai pasir, pantai berlumpur dan pantai berbatu.

Ekosistem mangrove yang terdapat di Pulau Bintan pada saat ini mempunyai luas sekitar 16.898 Ha yang tersebar di daerah Tanjung Uban, Tanjung Siambang, Teluk Sumbat, Busung, Engkang Anculai, sungai Gesek, Teluk Bintan, Bintan Timur dan pulau-pulau kecil lainnya. Kondisi mangrove secara umum sebagian besar telah mengalami kerusakan serta mengalami pengurangan luas lahan.

Pemanfaatan yang efisien, *equity* (adil) dan berkelanjutan melalui penetapan alternatif pemanfaatan yang strategis terhadap hutan mangrove yang tersisa, begitupula dengan pengaruh keterkaitan fungsi ekologis ekosistem mangrove terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir sangat penting untuk diteliti secara lebih komprehensif.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Tingkat intensitas pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi di sebagian besar wilayah pesisir tertentu telah menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap kondisi fisik lingkungan pesisir dan laut. Luas hutan mangrove di Indonesia terus mengalami penurunan dari luas areal yang mencapai 5.209.543 ha pada tahun 1982, menurun menjadi 3.325.700 ha pada tahun 1987 dan menurun lagi hingga sekitar 2.496.185 ha pada tahun 1993 (Dahuri,1996). Penurunan luas hutan mangrove hampir merata terjadi di seluruh kawasan pesisir Indonesia. Penyebab dari penurunan luasan mangrove tersebut adalah karena adanya peningkatan kegiatan yang mengkonversikan hutan mangrove menjadi peruntukkan perikanan seperti pembukaan tambak, pengembangan kawasan industri, pertambangan, pemukiman di kawasan pesisir, perluasan areal pertanian serta pengambilan kayu mangrove secara besar-besaran.

Salah satu kawasan pesisir yang mengalami kerusakan mangrove sebagai akibat pemanfaatan hutan mangrove yang tidak ramah lingkungan adalah di pesisir Kabupaten Bintan. Dahuri *et al* (1996) mengemukakan bahwa potensi ekosistem mangrove di Kabupaten Bintan tahun 1982 adalah 276.000 ha menjadi 188.400 ha pada tahun 1992, dimana terjadi penurunan 33 % selama 10 tahun atau sebesar 3,3 % per tahun. Di Kabupaten Bintan kerusakan hutan mangrove banyak disebabkan oleh adanya konversi lahan untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (tambak dan pertanian) dan pemanfaatan kayu mangrove untuk kebutuhan kayu bakar.

Pulau Bintan merupakan pulau yang memiliki kekayaan alam terutama bauksit dan granit, sehingga kegiatan penambangan mendapat prioritas bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan mangrove di wilayah pesisir Pulau Bintan

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bintan (2001), luas komunitas mangrove di Pulau Bintan yang meliputi Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Timur adalah seluas 16.898 ha. Dari jumlah tersebut, luas mangrove yang berada di Kecamatan Bintan Timur adalah 9.459 ha atau 55,98 % dari luas mangrove yang terdapat di Pulau Bintan.

Kondisi umum mangrove di Pulau Bintan maupun di Kecamatan Bintan Timur tidak begitu baik, banyak wilayah mangrove yang telah mengalami kerusakan, hal ini sebagai akibat dari kegiatan penambangan bauksit oleh beberapa perusahaan, pemukiman, perikanan dan penebangan liar oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu pada setiap lokasi hutan mangrove perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan untuk dipertahankan seperti kondisi semula, juga rehabilitasi hutan mangrove perlu dilakukan pada lokasi-lokasi yang mulai rusak maupun kritis kondisinya.

Dengan mencermati fenomena ekologi dari kondisi potensi sumberdaya ekosistem mangrove di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi dan jenis pemanfaatan ekosistem mangrove yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Kecamatan Bintan Timur ?
2. Berapakah nilai ekonomi dari ekosistem mangrove di Kecamatan Bintan Timur ?
3. Bagaimanakah alternatif pemanfaatan strategis yang efisien, *equity* serta berkelanjutan untuk ekosistem mangrove ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi potensi dan jenis pemanfaatan ekosistem mangrove oleh masyarakat lokal di Kecamatan Bintan Timur.
2. Menganalisis nilai ekonomi dari ekosistem mangrove.
3. Menganalisis alternatif pemanfaatan strategis untuk ekosistem mangrove di Kecamatan Bintan Timur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah berupa alternatif pemecahan masalah dalam pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah Kabupaten Bintan secara umum, khususnya di wilayah Kecamatan Bintan Timur.